

PAKTA INTEGRITAS DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

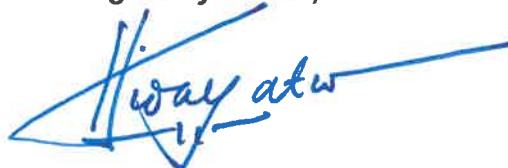
Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan,



**Saiful Hidayat
Direktur Utama**

PAKTA INTEGRITAS DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Ihsanudin

Direktur Perencanaan Strategis dan TI

PAKTA INTEGRITAS DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Bambang Joko Sutarto
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

PAKTA INTEGRITAS DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan,



**Trisna Sonjaya
Direktur Pelayanan**

PAKTA INTEGRITAS DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN


Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Eko Purnomo

Direktur Pengembangan Investasi

PAKTA INTEGRITAS DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Agung Nugroho
Direktur Kepesertaan

PAKTA INTEGRITAS DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Harjono Siswanto
Direktur Human Capital & Umum